

Wawasan
Halaman 17 dan 21
Edisi Senin, 1 September 2014

■ Tersangka Korupsi Bansos Jateng Belum Ditahan Kejati Dinilai Tak Serius

PLEBURAN - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng yang menangani kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintahan Jateng tahun 2010/2011 belum memeriksa dan menahan tersangka.

Kejati yang menyidik kasusnya sejak awal Januari 2014 lalu menyatakan, tidak mau buru-buru menahan tiga tersangka yang juga mantan dan pejabat di Pemprov Jateng.

Ketiga tersangka yakni Mohamad Yusuf, mantan Kepala Bi-

ro Bina Sosial, Joko Mardiyanto, mantan Kepala Biro Bina Mental (kini staf ahli gubernur) dan Joko Suyanto, mantan Ketua Tim Verifikasi proposal.

"Masih proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi. Ada sekitar 15 saksi yang sudah diperiksa dan masih ada beberapa yang belum, termasuk saksi ahli. Kenapa tersangka tidak ditahan, karena belum saja (ditahan). Kami khawatirnya, harus buru-buru karena penahanan ada batas waktunya," kata Asistem Tindak Pidana Khu-

sus (Aspidsus) Kejati Jateng, Masyhudi didampingi Kepala Seksi Penyidikan (Kasiedik), Imang Job Marsudi kepada wartawan, Minggu (31/8).

Selain masih memeriksa sejumlah saksi, Aspidsus mengaku masih merencanakan memeriksa tersangka meski sebelumnya sudah. "Pemeriksaan tersangka sudah, tapi belum menyeluruh," ujar dia.

Bersambung ke hal 21 kol 3

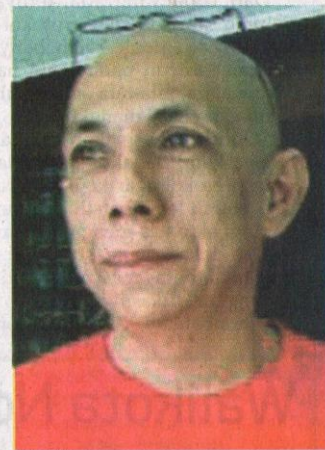


Foto: dok **Eko Haryanto**

Kejati.....

(Sambungan hlm 17)

■ Tak Serius

Koordinator Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menilai, penyidik Kejati Jateng yang menangani kasus dugaan korupsi bansos Jateng tak serius.

Menurutnya, sikap tidak buru-burunya penyidik serta tidak ditahannya tersangka korupsi, menjadi alasan ketidakseriusan.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan penanganan khusus. Jika demikian, itu menunjukkan kinerja kejaksaan tak serius menangani. Kami khawatir hal itu menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia," ujar dia.

Penyidikan kasus dugaan korupsi bansos juga terjadi di sejumlah daerah. Penanganannya dibagi-bagi perwilayah kejaksaan. Kasus korupsi diduga terjadi pada pos anggaran bansos pendidikan tahun 2010 dan bansos kemasyarakatan tahun 2011. Anggaran pos bansos pendidikan berasal dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng. Sementara, penyidikan kasus bansos kemasyarakatan yang dikeluarkan bina sosial Pemprov Jateng salah satunya didasarkan pada satu alat bukti investigasi BPKP Jateng.

Modus dugaan penyimpangan dan pola dugaan korupsi yang dilakukan, ditemukan adanya sejumlah titik sampel yang diduga fiktif. Dari sejumlah pos anggaran, ribuan penerima bansos diketahui fiktif.

Beberapa modus pelaku penerima bansos, di antaranya membuat proposal fiktif. Atas

proposal bansos yang disetujui, anggaran yang diterima dipotong antara 15-20 persen.

Sebagaimana diketahui, pos anggaran dana hibah dan bansos rawan dikorupsi. Dana hibah dan bansos kemasyarakatan pada APBD Jateng 2014 turun drastis. Dana hibah yang pada APBD 2013 tercatat Rp 3,9 triliun, kini turun menjadi 3,04 triliun.

Sedangkan dana bansos 2014 sebesar Rp 31,6 miliar. Meski naik 100 persen dari tahun sebelumnya, namun sebagian besar merupakan bansos infrastruktur untuk pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH).

Pada APBD 2013, dari Rp 15,3 miliar, sebanyak Rp 11,8 miliar untuk bansos kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan. Pada 2014 ada Rp 22,05 miliar untuk pemugaran RTLH yang pada 2013 hanya

dianggarkan Rp 3,4 miliar.

Pemerintah sengaja mengurangi dana bansos kemasyarakatan dan keagamaan yang rawan diselewengkan. Sedangkan bansos pendidikan dialihkan ke Dinas Pendidikan.

Pada tahun 2011, diduga pos bansos kemasyarakatan memiliki penyimpangan tertinggi. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng yang menyatakan ada indikasi penyimpangan dana Rp 26,89 miliar. Dana itu disalurkan tanpa disertai pertanggungjawaban memadai.

Selain tanpa LPJ, alamat penerima bansos diketahui banyak yang diduga fiktif. Bahkan dari 208 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang mendapatkan dana bansos, hanya 5 persen yang terdaftar di Badan Kesbangpolinmas Jateng. ■ **rdi-Ks**